



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DALAM MENGGANGKAT
GURU MUATAN LOKAL BUDAYA MELAYU ROKAN HILIR BERDASARKAN
PERATURAN BUPATI KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 79 TAHUN 2017
TENTANG PELAKSANAAN PEMBELAJARAN MUATAN LOKAL
BUDAYA MELAYU ROKAN HILIR

SKRIPSI

OLEH

MARADEN KASUMA HASIBUAN
11527103019

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU-PEKANBARU

1441 H/2020 M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi ini berjudul *"Kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dalam Mengangkat Guru Muatan Lokal Budaya Melayu Rokan Hilir Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pembelajaran Muatan Lokal Budaya Melayu Rokan Hilir"*

Nama : MARADEN KASUMA HASIBUAN
 NIM : 11527103019
 Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat di terima dan di setujui untuk di ujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 04 Maret 2020

Pembimbing Skripsi

NUR HIDAYAT, SH, MH

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كابة الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampar - Pekanbaru 28293 PC. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

KEWENANGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DALAM
MENGANGKAT GURU MUATAN LOKAL BUDAYA MELAYU ROKAN
HILIR BERDASARKAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN ROKAN
HILIR NOMOR 79 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN
PEMBELAJARAN MUATAN LOKAL BUDAYA MELAYU ROKAN HILIR

MARADEN KASUMA HASIBUAN
11527103019
ILMU HUKUM

Disahkan dimunaqasyahkan pada :
Hari / Tanggal : Senin / 4 Mei 2020
Waktu : 13.00 Wib

Dan telah melakukan perbaikan sesuai dengan Catatan dari Tim Penguji Munaqasyah Fakultas
Syariah dan Hukum UIN Suska Riau

Pekanbaru, 2020
Tim Penguji



1. Dr. H. Haghfirah, M.A
(Ketua sekaligus Anggota Penguji)
2. Joni Anson, SH, MH
(Sekretaris sekaligus Anggota Penguji)
3. H. Moka, Kastulani, SH, MH
(Anggota Penguji)
4. Firdaus, SH, MH
(Anggota Penguji)

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs.H. Hajar, M.Ag.
NIP. 19580712 198601 1 005

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Di larang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Pengangkatan guru muatan lokal budaya melayu Rokan Hilir dalam Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor 79 Tahun 2017 telah diatur dengan jelas di Paal 11 Ayat (1) dan Ayat (2) pemerintah dapat menyediakan guru muatan lokal budaya melayu Rokan Hilir sesuai dengan kebutuhan. dimana masih banyaknya guru-guru yang tidak sesuai dengan keahliannya yang mengajar muatan lokal dan masih banyak sekolah-sekolah yang tidak memiliki guru muatan lokal budaya melayu Rokan Hilir, dimana dengan tidak adanya guru yang mengajar muatan lokal budaya melayu Rokan Hilir dan ketidak mampuan guru-guru membidangi di dibidangnya akan membuat pembelajaran tidak efektif dan seharusnya dilakukan pengangkatan dan pelatihan terhadap guru-guru muatan lokal oleh Pemerintah namun belum terlaksana, dan di Pasal 12 telah diatur dengan jelas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir dapat melaksanakan pendidikan dan pelatihan kepada guru-guru yang tersebut di Pasal 10 yang akan mengajar muatan lokal budaya melayu Rokan Hilir namun kenyataan dilapangan belum terlaksana

Tujuan dari Penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam mengangkat guru muatan lokal budaya melayu Rokan Hilir berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 79 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pembelajaran muatan lokal budaya melayu Rokan Hilir dan untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat terhadap pengangkatan guru muatan lokal budaya melayu Rokan Hilir

Metode penelitian, jenis penelitian ini adalah penelitian sosiologis empiris. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah random sampling, yaitu pengambilan sampel secara acak, dan penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan daftar pustaka.

Hasil penelitian ini ialah masih banyak sekolah-sekolah yang tidak memiliki guru muatan lokal budaya melayu Rokan Hilir dan guru-guru yang mengajar yang tidak sesuai dengan keahliannya tidak mendapatkan pelatihan oleh Pemerintah. Belumadanya sosialisasi pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengenai PERBUP Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pembelajaran Muatan Lokal Budaya Melayu Rokan Hilir

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa Implementasi dari Kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam mengangkat guru muatan lokal budaya melayu Rokan Hilir berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 79 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pembelajaran muatan Lokal Budaya Melayu Rokan Hilir ini belum berjalan dan masih banyaknya guru-guru yang belum diangkat dan ditatih oleh Pemerintah/Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan masih banyaknya sekolah-sekolah yang belum memiliki guru muatan lokal dan tidak sesuai dengan bidangnya yang seharusnya dilatih agar memiliki kemampuan dan pengetahuan mengenai muatan lokal budaya melayu Rokan Hilir



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur Alhamdulillah, penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh cahaya keimanan dan ilmu pengetahuan. Semoga di Yaumul akhir kita tergolong sebagai umatnya yang memperoleh syafaatnya.

Skripsi dengan judul *“Kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dalam Mengangkat Guru Muatan Lokal Budaya Melayu Rokan Hilir Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pembelajaran Muatan Lokal Budaya Melayu Rokan Hilir”* merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam proses menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan banyak bantuan dari berbagai pihak, terutama oleh keluarga yang dengan tulus dan tidak henti-hentinya memberikan doa, dukungan penuh baik moral maupun materil.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak sedikit hambatan, rintangan serta kesulitan yang dihadapi. Namun berkat bantuan dan motivasi serta bimbingan yang tidak ternilai dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Di larang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis juga menghaturkan dengan penuh rasa hormat ucapan terimakasih yang dalam kepada:

1. Kedua orang tua Ayahanda Mara Pontas Hasibuan dan Ibunda Megawati Tercinta (Ibu Kandung), Ibunda Nurasih Tercinta (Ibu Tiri) yang sama kebaikan seperti ibu kandung, yang selama ini senantiasa mendoakan saya, mencurahkan kasih sayangnya dan doa yang tak terhingga yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini. Doa dan ridho dari ayahanda dan ibundalah yang selalu penulis harapkan.
2. Bapak Prof. Dr. Mujahidin.,M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar.,M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Firdaus,SH, MH selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Nur Hidayat,SH, MH selaku dosen pembimbing dalam pembuatan skripsi yang telah membagi ilmunya dengan sabar, meluangkan waktu, dan tenaga dalam membimbing penulis dalam membuat skripsi.
6. Bapak Ilham Akbar, SH, MH selaku Penasehat Akademis yang telah memberikan nasehat dan arahan selama proses perkuliahan.
7. Adik-adik saya, Rezki Imam Pratama, Aidha Kiftia Rangganis, Mahesa Jagad Nara Indra, dan Andini Putri Salindri
8. Kakanda-kakanda dan ayunda, Epis, Muhammad Aldino, Eka dan Monalisa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
9. Novitasari, S.E. yang selalu memberikan motivasi penulis serta nasehat beserta arahan selama masa perkuliahan dan dorongan untuk penyelesaian skripsi penulis.
 10. Bapak dan Ibu Dosen, yang telah memberi bekal ilmu yang tidak ternilai harganya selama mengikuti perkuliahan di Jurusan Ilmu Hukum.
 11. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pekanbaru Komisariat Syariah, Ushuludin dan Fapertapet (SUPER) yang tidak bisa disebutkan satu persatu terimakasih banyak kalian semua telah memberikan pembelajaran dan pengalaman dalam Kepemimpinan, Managemen dan Organisasi.
 12. Kepada Kakanda Muhammad Ali SH sebagai senior, Muhammad Zulfan Arif SH, Muhammad Prabowo Wiguna SH, Muhammad Adnan SH yang menemani selama proses penelitian, Masidik Siregar SH, Ali Yafi Hamdani, Jumfitriadi SH dan Keluarga yang memberikan masukan-masukan dan membantu dalam melakukan Pra Riset, Ramlan Pulungan SH yang memberikan masukan-masukan, Habibi Hamdani SH, Bang Sulaiman, Terimakasih banyak karena telah bisa berjuang bersama-sama.
 13. Kepada adinda saya, adinda Romadhan Hasibuan dan Afrizal Hasibuan dan Keluarga yang membantu saya dalam penelitian di Kecamatan Kubu Terimakasih banyak
 14. Keluarga besar Jurusan Ilmu Hukum angkatan 2015 yang tidak bisa disebutkan nama nya satu persatu terimakasih banyak kalian semua telah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan warna dalam kehidupan, telah mengajarkan arti persahabatan semoga kelak kita berjumpa dalam kehidupan yang lebih baik. Amin

Mohon maaf jika ada pihak yang tidak disebutkan, tanpa mengurangi rasa hormat terima kasih atas segala dukungannya. Penulis sangat sadar akan segala dorongan dan bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak. atas segala peran dan partisipasinya yang telah diberikan dan semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Akhirnya penulis mengharapkan mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi dunia pendidikan kedepannya. *Aamiin YaaRobbal 'Alamin..*

Pekanbaru, Maret 2020

Penulis

MARADEN KASUMA HASIBUAN
NIM. 11527103019

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Dan Manfaat Peneitian	11
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Kondisi geografis Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir Riau	21
1. Letak dan Geografis	21
2. Profil Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir	28
3. Visi dan Misi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Rookan Hilir	41
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	
A. Teori Pemerintahan Daerah	42
1. Pengertian Pemerintahan Daerah	42
2. Kewenangan Pemerintahan Daerah	45
B. Teori Kewenangan	50
C. Pengertian Pendidikan, Guru, Muatan Lokal dan Kebudayaan	54
1. Pendidikan	54

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Guru	56
3. Muatan Lokal	56
4. Kebudayaan	56

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Dalam Mengangkat Guru Muatan Lokal Budaya Melayu Rokan Hilir Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pembelajaran Muatan Lokal Budaya Melayu Rokan Hilir	58
B. Faktor penghambat kewenangan dinas pendidikan dan kebudayaan dalam mengangkat guru muatan lokal budaya melayu rokan hilir berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pembelajaran Muatan Lokal Budaya Melayu Rokan Hilir	66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA	73
----------------------	----

LAMPIRAN

BIOGRAFI PENULIS

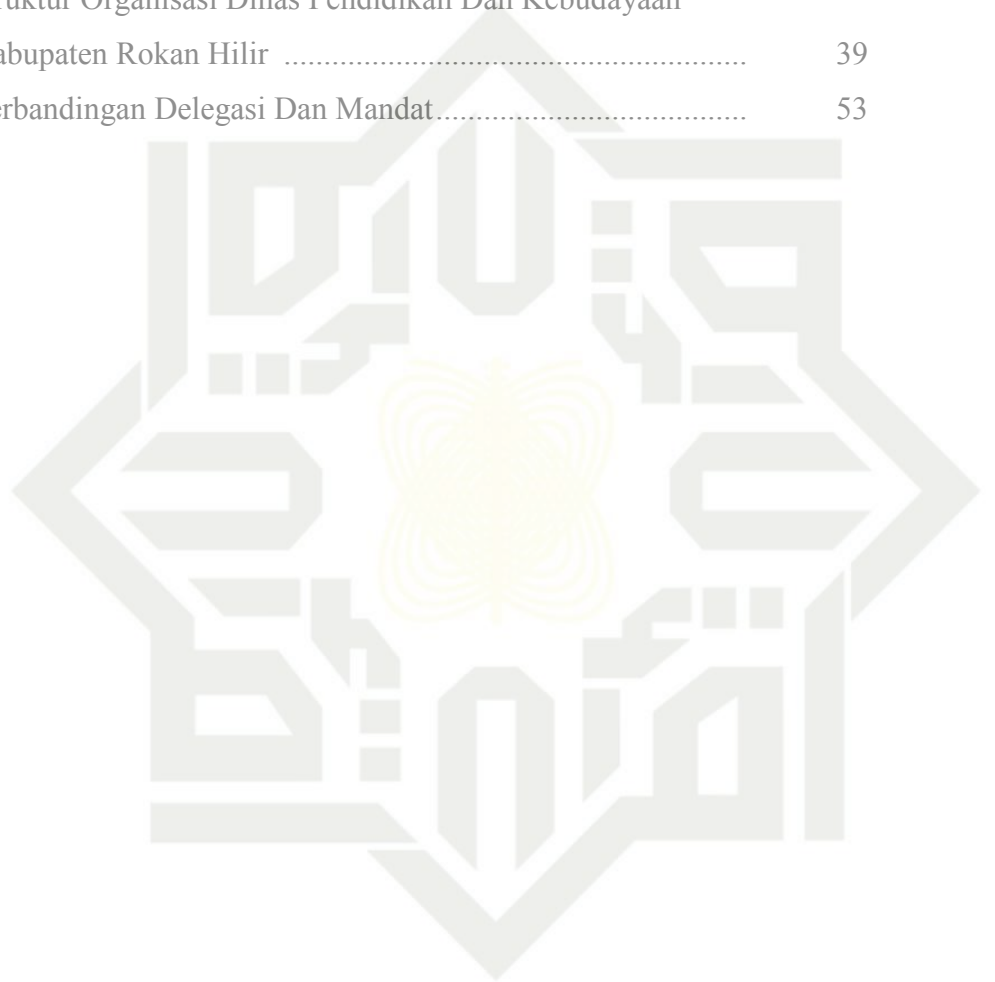


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Populasi Dan Sampel.....	14
Tabel II.1	Struktur Organisasi Kecamatan Kubu	25
Tabel II.2	SDN Kecamatan Kubu	27
Tabel II.3	Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir	39
Tabel III.1	Perbandingan Delegasi Dan Mandat.....	53



UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang menganut paham negara hukum, hal ini berarti bahwa kekuasaan di dalam negara harus dibatasi oleh hukum, hukum sebagai panglima (*supremacy of law*). A Hamid S. Attamimi dengan mengutip Burckens, mengatakan bahwa negara hukum secara sederhana adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum.¹

Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik, dan negara yang terdiri dari satu-kesatuan yang memiliki 34 Provinsi. Untuk mengatur pemerintahannya sendiri, Indonesia pernah menerapkan sentralisasi, dimana seluruh Kewenangan dan Pemerintahan di urus oleh Pemerintah Pusat. Sistem sentralisasi ini pernah diterapkan pada zaman Kemerdekaan hingga Orde Baru. Akan tetapi sistem sentralisasi ini memiliki kelemahan dimana sebuah kebijakan dan keputusan Pemerintah Daerah dihasilkan oleh orang-orang yang berada di Pemerintah Pusat sehingga waktu untuk memutuskan suatu hal menjadi lebih lama.

Selama berlangsungnya pemerintahan Orde Baru, Daerah tidak dapat berkembang secara optimal karena sistem politik dan ekonomi yang dibangun pemerintah Orde Baru sangat sentralistik. Segala kebijakan tentang daerah selalu

¹ A Hamid S Attamimi, *Teori Perundang-Undangan Indonesia*, Makalah Pada Pidato Upacara Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Di Fakultas Hukum UI (Jakarta: 25 April 1992) H. 8 dalam Buku Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Rajagrafindo, 2007), h.18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditentukan oleh Pusat. Daerah tidak memiliki keleluasaan untuk mengembangkan potensi daerahnya, bahkan akhirnya menjadi sangat tergantung dengan pusat.² Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah telah dibuka saluran baru bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam pelayanan umum kepada masyarakat setempat untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri³

Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik pasal 18 ayat (1) yang mana Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah-daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dengan Undang-undang.⁴ Menurut Christian Van Vollenhoven, hukum tata negara mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan menurut tingkatan-tingkatannya yang masing-masing menentukan wilayah atau lingkungan masyarakat hukum yang bersangkutan beserta fungsinya masing-masing, serta menentukan pula susunan dan kewenangan badan-badan yang dimaksud.⁵ Dengan banyak suku bangsa di Indonesia ini, kebudayaan Indonesia juga beraneka ragam. Sangat banyak masacam kebudayaan Indonesia ini. Pengaruh dari globalisasi, modernnisasi, hingga pengaruh budaya barat, sangat berdampak besar bagi tumbuh dan berkembangnya budaya di Indonesia. Dimana banyak kebudayaan-kebudayaan yang sudah tidak dilestarikan lagi

² Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangannya Dan Problematikannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h.79

³ HAW Wijdjaja, *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonomi*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002), h. 1

⁴ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Ayat (1)

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu hukum Tata Negara* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Depok 2017), h.20.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta ini dilindungi undang-undang. UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bankan mulai hilang semakin berkembangnya zaman. Untuk mengatasi hal tersebut, maka pada tahun 2017 di keluarkanlah Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan dalam rangka melindungi, memanfaatkan, dan mengembangkan kebudayaan Indonesia. Untuk menjaga dan salah satu untuk mengembangkan kebudayaan ini ialah dengan diajarkan di sekolah-sekolah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sesuai yang tertera di Pasal 7 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuaan Kebudayaan yang berbunyi, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pengarusutamaan kebudayaan melalui pendidikan untuk mencapai tujuan pemajuan kebudayaan⁶

Dalam Pasal 31 Ayat (2) setiap Warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan Pemerintahan wajib membiayainya.⁷ Semenjak Otonomi Daerah, dan Daerah mempunyai wewenang untuk mengurus sendiri pemerintahannya maka disitu juga pemerintah berhak untuk membuat suatu kebijakan mengenai pendidikan yang bersifat khusus didaerah tersebut. Salah satunya yaitu Provinsi Riau, dimana dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan didalam pasal 33 di peraturan ini mengatur mengenai bahwa setiap Satuan Pendidikan wajib mengajarkan pembelajaran Muatan Lokal Budaya Melayu Riau dan Pemerintah berkewajiban menyediakan guru Muatan Lokal Budaya Melayu Riau.⁸

⁶ Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Pasal 7

⁷ *Ibid.*, Pasal 31 (2)

⁸ Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 33

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten Rokan Hilir salah satu Kabupaten yang terdapat di Provinsi Riau yang terdiri dari 16 kecamatan, dan Kabupaten Rokan Hilir mempunyai SMP (Sekolah Menengah Pertama) 74 dan 301 SD (Sekolah Dasar). Salah satu kecamatan tertua di Kabupaten Rokan Hilir ini adalah Kecamatan Kubu, dimana Kecamatan Kubu inilah mulainya perkembangan di Kabupaten Rokan Hilir hingga terbagi-bagi menjadi beberapa kecamatan. Kecamatan Kubu memiliki SMP (Sekolah Menengah Pertama) 6 dan SD (Sekolah Dasar) 21 sekolah. Di setiap sekolah SD maupun SMP mempunyai mata pelajaran muatan lokal, dan guru-guru yang mengajar seharusnya sudah mengikuti pelatihan yang telah diberikan oleh dinas pendidikan dan kebudayaan dalam mengajar muatan lokal.

Dalam pengertiannya Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi di dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, keribadiaan, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang di perlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara.⁹ Dalam pengembangan kurikulum pendidikan dasar dan menengah Pemerintah wajib memuat mata pelajaran muatan lokal yang mana telah diamanatkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 32 tahun 2013 pasal 77 I ayat (1) huruf j Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.¹⁰

⁹ Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat (1)

¹⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Di larang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk mengembangkan dan memajukan Bangsa Indonesia ini sangatlah dibutuhkan SDM (Sumber Daya Manusia) yang baik, dan Negara mempunyai tugas untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Negara hadir disini dengan memberikan pendidikan kepada Warga Negaranya. Pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat penting karena pendidikan mempunyai tugas untuk menyiapkan SDM bagi pembangunan bangsa dan Negara. C. Arnol Anderson ia mengatakan pendidikan disamping memberikan keahlian dan keterampilan untuk mencari nafkah, juga memelihara sistem-sistem intelektual, kesustaraan seni, hukum dan ilmu pengetahuan¹¹, Pendidikan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap kemajuan suatu bangsa, dan merupakan wahana dalam menerjemahkan pesan-pesan konstitusi serta sarana dalam membangun watak bangsa. Masyarakat yang cerdas akan memberikan nuansa kehidupan yang cerdas pula, secara progresif akan membentuk kemandirian. Diterapkannya otonomi daerah maka membuat pemerintah daerah berwenang dalam mengatur sistem pemerintahannya sendiri. Daerah mempunyai wewenang yang penuh dalam mengatur dan mengelola pendidikan yang ada di daerahnya baik pendidikan dasar maupun pendidikan tinggi.¹²

Salah satu yang harus di perhatikan ialah tumbuh dan berkembangnya kearifan lokal dan adat istiadat, Karena seperti yang kita tahu bahwa Indonesia ini terdiri dari bermacam-macam suku dan memiliki banyak adat istiadat. Akibat tumbuh dan berkembangnya suatu Negara dan faktor dari globalisasi perkembangan

¹¹ Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2002), h. 74

¹² H.A.R Tilaar, *Kekuasaan Dan Pendidikan Manajemen Pendidikan Nasional Dalam Persaran Kekuasaan*, (Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2009), h. 295.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

zaman hampir kita lihat satu persatu budaya, adat istiadat, Bahasa dan kearifan lokal sudah luput dari perhatian, dan hampir hilang.

Melihat kondisi yang seperti ini, amat di rugikan sekali bagi generasi yang akan datang jika mereka tidak mengetahui adat istiadat, budaya, bahasa, dan kearifan lokal tempat mereka tinggal. Untuk mengantisipasi hilangnya adat istiadat, bahasa, dan untuk melestarikan budaya serta kebiasaan dalam adat istiadat itu maka salah satu Bupati Kabupaten Rokan Hilir di Provinsi Riau mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pembelajaran Muatan Lokal Budaya Melayu Rokan Hilir. Dikeluarkanya Peraturan Bupati ini guna agar para generasi muda yang akan datang dapat menanamkan budaya melayu Rokan Hilir yang bernilai etika, estetika, kinestetika, moral dan spiritual.

Berdasarkan salah satu tujuan dari hukum yaitu kemanfaatan, yang mana kemanfaatan merupakan tujuan hukum yang penting untuk dibicarakan. Dan hukum yang baik adalah hukum yang membawa kemanfaatan bagi manusia.¹³ Dalam hal pembelajaran muatan lokal Budaya Melayu Rokan Hilir di setiap sekolah dan madrasah bertujuan agar peserta didik, Menanamkan nilai-nilai Melayu Rokan Hilir, menanamkan nilai-nilai Melayu Rokan Hilir dalam kehidupan sehari-hari, mempertahankan dan mewariskan budaya Melayu kepada peserta didik, mengembangkan budaya Melayu Rokan Hilir

Berdasarkan Bab II Penerapan Muatan Lokal Budaya Melayu Rokan Hilir Pasal 5 pembelajaran muatan lokal Budaya Melayu Rokan Hilir ini diberikan pada

¹³ Lisa Angrayni, *Pengantar Ilmu Hukum* (Pekanbaru: Suska Pres 2014), h. 34.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tingkatan pendidikan meliputi, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah muai kelas I (satu) dan II (dua) Tulisan Arab Melayu, III (tiga) sampai keas IV (enam), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa diberikan mulai kelas VII (tujuh) sampai dengan kelas IX (Sembilan), pendidikan Kesetaraan meliputi Paket A dan Paket B, untuk pelaksanaan pembelajaran pada Huruf a dan b, terlampir.¹⁴

Pembelajaran muatan lokal Budaya Melayu Rokan Hilir di sekolah bertujuan agar peserta didik mengenali sejarah dan budaya melayu Rokan Hilir, menanamkan nilai-nilai budaya melayu Rokan Hilir dalam kehidupan sehari-hari, mempertahankan dan mewariskan budaya melayu kepada peserta didik, dan mengembangkan budaya melayu rokan hilir.¹⁵

Dalam menjalankan Peraturan Bupati ini maka Pemerintah Rokan Hilir menyediakan guru Muatan lokal Budaya Melayu Rokan Hilir dan dapat pula disediakan oleh penyelenggara pendidikan. Pemerintah dapat mengangkat guru bukan ASN untuk menjadi guru Mutan Lokal Dalam Pasal 10 Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pembelajaran Muatan Lokal Budaya Melayu Rokan Hilir, guru yang mengajarkan muatan lokal budaya melayu Rokan Hilir adalah guru mata pelajaran tulisan Arab Melayu, guru mata pelajaran keterampilan mulok, guru mata pelajaran keterampilan, guru mata pelajaran seni budaya, guru mata pelajaran pendidikan jasmani olahraga kesehatan dan guru mata pelajaran seni musik yang memiliki pengetahuan budaya melayu Riau Rokan Hilir, berkepribadian, tauladan

¹⁴ Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pembelajaran Muatan Lokal Budaya Rokan Hilir

¹⁵ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

dan memiliki komitmen untuk memajukan kebudayaan, keunggulan dan potensi lokal¹⁶. Didalam Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2017 tersebut di Pasal 11 yaitu Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir menyediakan guru muatan lokal budaya Melayu Rokan Hilir sesuai dengan kebutuhan. Dalam pasal 12 Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pembelajaran Muatan Lokal Budaya Melayu Rokan Hilir, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir dapat melaksanakan pendidikan dan pelatihan kepada guru-guru yang akan mengajar Muatan Lokal Budaya Melayu Rokan Hilir.¹⁷ Mengingat juga pada Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan guru Muatan Lokal Budaya Melayu Riau, dan juga pada Peraturan Gubernur Riau Nomor 72 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pembelajaran Muatan Lokal Budaya Melayu Riau dimana pada pasal 11 ayat (1), Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyediakan guru Muatan Lokal Budaya Melayu Riau sesuai dengan kebutuhan dan pada Pasal 12 Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dapat melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi guru Muatan Lokal Budaya Melayu Riau¹⁸. Dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengamanatkan kesetiap-tiap Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan setiap Kecamatan untuk mencari atau menunjuk guru-guru Mutan lokal setiap Sekolah untuk mengikuti Pelatihan. Hal ini sesuai dengan tugas-tugas Pemerintah dalam Negara Hukum Modern (*welvaarsstaat*) yaitu salah satunya *Freies Ermessen* yaitu

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Peraturan Gubenur Riau Nomor 72 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Pembelajaran Muatan Lokal Budaya Melayu Riau Pasal 11 Ayat (1) Dan Pasal 12

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemberian kewenangan kepada administrasi negara untuk bertindak atas inisiatif sendiri untuk mewujudkan kepentingan umum.¹⁹ Sangatlah bagus jika guru-guru yang mengajar Muatan Lokal Budaya Melayu Riau sangat terlatih dan membekali dibidangnya hingga akan mampu untuk mengajar siswa/siswi hingga mereka menerapkan nilai-nilai Budaya Melayu Riau.

Masalahnya kenyataan dilapangan bahwa kebijakan ini belum berjalan semestinya, salah satunya di Kecamatan Kubu. Mengutip dari pengertian Studi Implementasi Hukum Kebijakan Publik bahwa implementasi hukum kebijakan publik diartikan sebagai bentuk pengoprasian atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama diantara orang-orang yang berkepentingan didalamnya.²⁰ Kebijakan publik dilihat dari perspektif instrumental, adalah alat untuk mencapai suatu tujuan yang berkaitan dengan upaya pemerintah mewujudkan nilai-nilai kepublikan (*public values*).²¹ Dari observasi penulis menemukan belum adanya pengangkatan guru oleh pemerintah untuk menjadi guru Muatan Lokal Budaya Melayu, dan dari beberapa sekolah yang mana tenaga pengajar atau guru yang bersangkutan atau yang mengajar muatan lokal tidak memiliki sertifikat khusus, padahal di dalam Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pembelajaran Muatan Lokal Budaya Melayu Rokan Hilir memberikan kewenangan kepada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Di larang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada 2006), h.15

²⁰ Solihin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan*, (Jakarta: Bumi Aksara 2018), h.133. Dalam Buku Abu Sama *Hukum Kebijakan Publik*, (Pekanbaru 2018), h.14.

²¹ Ibid.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan pelatihan sesuai yang diamanatkan dalam pasal 10.²² Dimana, akibat dari tidak diadakannya pengangkatan Guru oleh Dinas Pendidikan mengakibatkan banyaknya guru-guru yang mengajar Muatan Lokal tidak sesuai dengan keahliannya, pada akhirnya akan membuat guru yang mengajar tidak efektif dalam mengajar kepada siswa. Erni Amani S.Pd Kepala Sekolah SD 002 Teluk Merbau Kecamatan Kubu mengatakan bahwa sampai saat ini belum ada pengangkatan guru oleh Pemerintah atau Dinas Pendidikan guru yang mengajar Muatan Lokal ialah guru Matematika yang tidak sesuai dengan keahliannya.²³ H. Rasyid Abizar Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian Lembaga Adat Melayu Kabupaten Rokan Hilir (KETUM DPH LAM ROHIL) mengatakan bahwa sampai saat ini untuk pengangkatan guru dan pelathannya belum ada implementasinya sama sekali²⁴ namun sampai saat ini wewenang yang diberikan oleh peraturan bupati belum terlaksana sepenuhnya.

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dalam Mengangkat guru Muatan Lokal Budaya Melayu Rokan Hilir berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor 79 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pembelajaran Muatan Lokal Budaya Melayu Rokan Hilir, dimana didalam Peraturan Bupati tersebut bahwa untuk mengajar muatan lokal Budaya Melayu Rokan Hilir sudah ditentukan beberapa guru diantaranya yaitu guru olahraga, guru mata pelajaran keterampilan, guru seni budaya, guru seni musik yang mana guru-guru tersebut harus mendapatkan

²² Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 79 Tahun 2017, *Op.Cit.*

²³ Wawancara Dengan Ameni Erni, 15 July 2019 Kepala Sekolah SD 002 Teluk Merbau

²⁴ Wawancara Dengan Abizar Rasyid, 16 July 2019 di Kantor LAM Kabupaten Rokan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelatihan dan diangkat oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Salah satunya lagi tujuan dari penelitian ialah untuk mengetahui faktor yang menghambat kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dalam Mengangkat guru Muatan Lokal Budaya Melayu Rokan Hilir berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor 79 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pembelajaran Muatan Lokal Budaya Melayu Rokan Hilir, dimana disini tujuannya yaitu untuk mencari tahu kenapa peraturan ini tidak berjalan semestinya.

Manfaat dari penelitian ini ialah agar supaya dapat mengetahui Kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dalam Mengangkat Guru Muatan Lokal Budaya Melayu Rokan Hilir berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor 79 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pembelajaran Muatan Lokal Budaya Melayu Rokan Hilir dan dapat mengetahui khususnya dibidang hukum

Disini penulis tertarik ingin meneliti masalah ini dengan judul **Kewenangan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Dalam Mengangkat Guru Muatan Lokal Budaya Melayu Rokan Hilir Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pembelajaran Muatan Lokal Budaya Melayu Rokan Hilir.**

Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini adalah Kewenangan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Dalam Mengangkat Guru Muatan Lokal Budaya Melayu Rokan Hilir Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pembelajaran Muatan Lokal Budaya Melayu Rokan Hilir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah, sebagai berikut :

1. Bagaimana Kewenangan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Dalam Mengangkat Guru Muatan Lokal Budaya Melayu Rokan Hilir Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pembelajaran Muatan Lokal Budaya Melayu Rokan Hilir
2. Bagaimana faktor penghambat Kewenangan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Dalam Mengangkat Guru Muatan Lokal Budaya Melayu Rokan Hilir Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pembelajaran Muatan Lokal Budaya Melayu Rokan Hilir

Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Kewenangan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Dalam Mengangkat Guru Muatan Lokal Budaya Melayu Rokan Hilir Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pembelajaran Muatan Lokal Budaya Melayu Rokan Hilir
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat Kewenangan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Dalam Mengangkat Guru Muatan Lokal Budaya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melayu Rokan Hilir Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pembelajaran Muatan Lokal Budaya Melayu Rokan Hilir

2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk salah satu syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Untuk mendalami pengetahuan penulis dalam bidang hukum khususnya Hukum Tata Negara.
- c. Untuk kajian dan bahan informasi bagi peneliti berikutnya untuk permasalahan yang sama.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²⁵ Metode merupakan cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas hukum ini berlaku dalam

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2012), h. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat.²⁶ Penelitian ini juga bertitik tolak dari data primer atau dasar yakni data yang diperoleh langsung yang dilakukan baik melalui Observasi (Pengamatan) maupun wawancara. Sifat penelitian adalah Deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan gejala, kelompok tertentu untuk menemukan penyebaran suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat.²⁷

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir. Alasan penulis memilih tempat tersebut karena lokasi tersebut memenuhi kriteria syarat permasalahan penelitian, selain itu penulis menemukan kesenjangan antara peraturan dan penegakannya di lapangan.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir, Ketua Dewan Pimpinan Harian Lembaga Adat Melayu Rokan Hilir (DPH LAM ROHIL), kepala sekolah se-kecamatan Kubu Rokan Hilir, guru mata pelajaran muatan lokal se-kecamatan Rokan Hilir Koordinator Wilayah (KORWIL) bagian Pendidikan, Kecamatan Kecamatan Kubu. Sedangkan objek dari penelitian ini kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hilir Tentang Pelaksanaan Pembelajaran Muatan Lokal Budaya Melayu Rokan Hilir

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (UII Press, Jakarta, 1982), h. 51

²⁷ Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2010), h. 25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan dan/atau objek yang menjadi penelitian.²⁸ Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, tempat atau ciri atau sifat yang sama. Populasi dalam Penelitian ini adalah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir, Ketua DPH LAM ROHIL, kepala sekolah se-kecamatan Kubu Rokan Hilir, guru Muatan Lokal se-kecamatan Kubu Rokan Hilir. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.²⁹

TABEL I.1
POPULASI DAN SAMPEL

Responden	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase
Kepala Bagian Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 orang	1 orang	100%

²⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2014). h. 98

²⁹ Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Op. Cit*, h. 106

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepala Sekolah se-kecamatan Kubu	19 orang	7 orang	36,8%
Ketua Lembaga Adat Melayu Rokan Hilir	1 orang	1 orang	100%

5. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini ada tiga jenis data yang digunakan oleh peneliti, antara lain :

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan atau tempat lokasi penelitian³⁰ baik dengan metode pengamatan (Observasi) ataupun wawancara (*Interview*) dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir, kepala sekolah se-kecamatan Kubu, dan ketua Lembaga Adat Melayu Rokan Hilir
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku yang menyangkut dengan penelitian, jurnal yang menyangkut dengan penelitian, peraturan perundang-undangan dan lainnya. Data sekunder tersebut dibagi menjadi:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan, keputusan menteri, peraturan daerah.³¹ Bahan hukum primer ini dalam penelitian ini antara lain, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan

³⁰ *Ibid*, h. 30.

³¹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 156.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Peraturan Gubernur Riau Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pembelajaran Muatan Lokal Budaya Melayu Riau, dan Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pembelajaran Muatan Lokal Budaya Melayu Rokan Hilir.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang diperoleh dari kepustakaan, dan dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Yang dapat berupa file-file yang berkaitan dengan penelitian disebuah instansi, rancangan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan berupa buku-buku yang mendukung terlaksananya penelitian ini merupakan data sekunder.³²
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang berupa kamus.³³

6. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, metode yang peneliti gunakan adalah :

- a. Observasi, yaitu peneliti mengadakan pengamatann langsung dilokasi penelitian terhadap objek kajian untuk mendapatkan secara nyata tentang yang diteliti.

³²*Ibid* h. 158

³³*Ibid.*, h. 158.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Wawancara, yaitu peneliti melakukan Tanya jawab secara langsung dengan narasumber atau responden yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti guna melengkapi data yang diperlukan.³⁴ Dalam penelitian ini, yaitu dengan cara mempertanyakan langsung kepada Kepala Bagian Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir, Kepala Sekolah se-kecamatan Kubu, Ketua Lembaga Adat Melayu Rokan Hilir.
- c. Studi pustaka, yaitu peneliti mencari data atau informasi melalui jurnal, buku-buku referensi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Metode ini digunakan untuk mencari data sekunder guna mendukung data primer.

7. Analisa Data

Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori/struktur klasifikasi. Data bisa saja dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman) dan biasanya diproses terlebih dahulu sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih-tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas, dan tidak menggunakan perhitungan

³⁴ Suratman Dan Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Alfabet, Bandung, 2014),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

matematis atau statistika sebagai alat bantu analisis.³⁵ Selanjutnya penulis akan membuat kesimpulan dengan cara induktif yang menarik kesimpulan dari hal yang bersifat khusus kepada hal yang bersifat umum. Berikut ini adalah teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti:

1. Reduksi Data

Reduksi data biasa dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada dalam penelitian. Dengan kata lain proses reduksi data ini dilakukan oleh peneliti secara terus menerus saat melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan-catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil penggali data.

2. Penyajian Data

Langkah ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarik kesimpulan. Pada tahap ini peneliti berupaya mengklafikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap subpokok permasalahan.

3. Kesimpulan

Kesimpulan adalah tahap akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan data-data yang telah

³⁵ Sugiyono, *Op. Cit.*, h. 338.

diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.

Sistematika Penulisan

Penulisan ilmiah ini terdiri dari 5 (lima) bab. Tiap-tiap bab terbagi lagi dalam sub bab yang memuat uraian dan bahasan tersendiri. Akan tetapi, antara satu bab dengan bab yang lain saling berhubungan, dan memuat suatu rangkaian yang tidak terpisahkan. Untuk lebih jelasnya sistematika tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat uraian tentang latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, selanjutnya akan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM PENELITIAN

Bab ini memuat uraian tentang gambaran umum Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir Kecamatan Kubu. Dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

Bab ini memuat uraian teori-teori sebagai dasar hukum yang melandasi permasalahan meliputi pelaksanaan dan faktor yang menjadi penghambat dalam Kewenangan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Berdasarkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pembelajaran Muatan Lokal Budaya melayu Rokan Hilir

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat uraian bagaimana Kewenangan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Terhadap Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kepada Guru Muatan Lokal Budaya Melayu Rokan Hilir Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pembelajaran Muatan Lokal Budaya Melayu Rokan Hilir Di Sekolah Dasar Negeri se-kabupaten Rokan Hilir Apa saja faktor penghambat Kewenangan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Terhadap Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kepada Guru Muatan Lokal Budaya Melayu Rokan Hilir Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pembelajaran Muatan Lokal Budaya Melayu Rokan Hilir

BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat uraian tentang kesimpulan dan saran.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Kondisi Geografis Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir Riau

1. Letak dan Geografis

Kecamatan Kubu merupakan salah satu Kecamatan tertua di Kabupaten Rokan Hilir. Kecamatan Kubu merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir yang dilalui oleh jalur Provinsi Riau. Secara umum keadaan topografinya adalah berupa dataran meskipun ada beberapa daerah yang berbukit-bukit. Kecamatan Kubu terdiri dari 1 (satu) Kelurahan, 9 (Sembilan) Kepenghuluan, 41 (empat puluh satu) Dusun, 79 (tujuh puluh Sembilan) Rukun Warga, dan 195 (seratus Sembilan puluh lima) Rukun Tetangga. Berikut ialah kepenghuluan dan kelurahan di Kecamatan Kubu³⁶ :

1. Kelurahan Teluk Merbau
2. Kepenghuluan Rantau Panjang Kanan
3. Kepenghuluan Sungai Segajah Makmur
4. Kepenghuluan Sungai Kubu
5. Kepenghuluan Sungai Kubu Hulu
6. Kepenghuluan Teluk Piyai

³⁶ Observasi, Kantor Camat Kubu, Tanggal 29 Januari 2020



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir
8. Kepenghuluan Tanjung Leban
9. Kepenghuluan Sungai Segajah Jaya
10. Kepenghuluan Sungai Segajah

Tinggi pusat Pemerintahan wilayah Kecamatan dari permukaan laut 2,8 M, jarak pusat pemerintahan wilayah kecamatan dengan Desa atau Kelurahan yang terjauh 20 KM, dengan Ibukota Kabupaten/Kota 160 KM dan dengan Ibukota Provinsi 660 KM. Luas Kecamatan Kubu 385.36 Hektar (HA). Berikut data Kecamatan Kubu³⁶ :

1. PEMERINTAH KECAMATAN

Kantor Pemerintah Wilayah Kecamatan

a. Status Kepemilikan	: Milik Pemda Rohil
b. Luas Tanah	: 7 Ha (1 + 1 + 5)
c. Luas Bangunan	: 575 M2 (375 + 200)
d. Apabila Milik Pemerintah	
- Dibangun tahun	: 1984; 2008; 2010, 2015
- Sumber Dana	: APBD PEMERINTAH
- APBN	KAB. ROHIL
- INPRES	:-
- APBD I	:-

³⁶ Observasi, Kantor Camat Kubu, Tanggal 29 Januari 2020



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim I

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- APBD II	:Rp
-lain-lain yang syah	:Rp
JUMLAH	:-
- Bangunan Bertingkat	:-
	: 2 Unit
Rumah Jabatan Camat	
a.Status Rumah Jabatan Camat	: Milik Pemda Rohil
b.Luas Bangunan	: 425 M2 (200 + 225)
c.Apabila Milik Pemerintah	
- Dibangun tahun	: 1984 ; 2010,2015
- Sumber Dana	: APBD PEMERINTAH
- APBN	KAB.ROHIL
- APBD I	:-
- APBD II	:-
- Swadaya	:-
- Jumlah	:-
d.Kondisi Bangunan	:-
	: Tidak Terpakai; Rusak
	Ringan
Jumlah Intansi Pemerintah yang ada di wilayah kec	
a.Intansi Vertikal	: 3

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b.Intansi Otonom	: 4
c.Intansi BUMN/BUMD	: -
Jumlah	: -
Jenis Pegawai Kantor Kecamatan	
a.Pegawai Pusat Dpk	: 2 orang
b.Pegawai Pusat Dpk	:
c.Pegawai Daerah/ otonom	: 208 orang



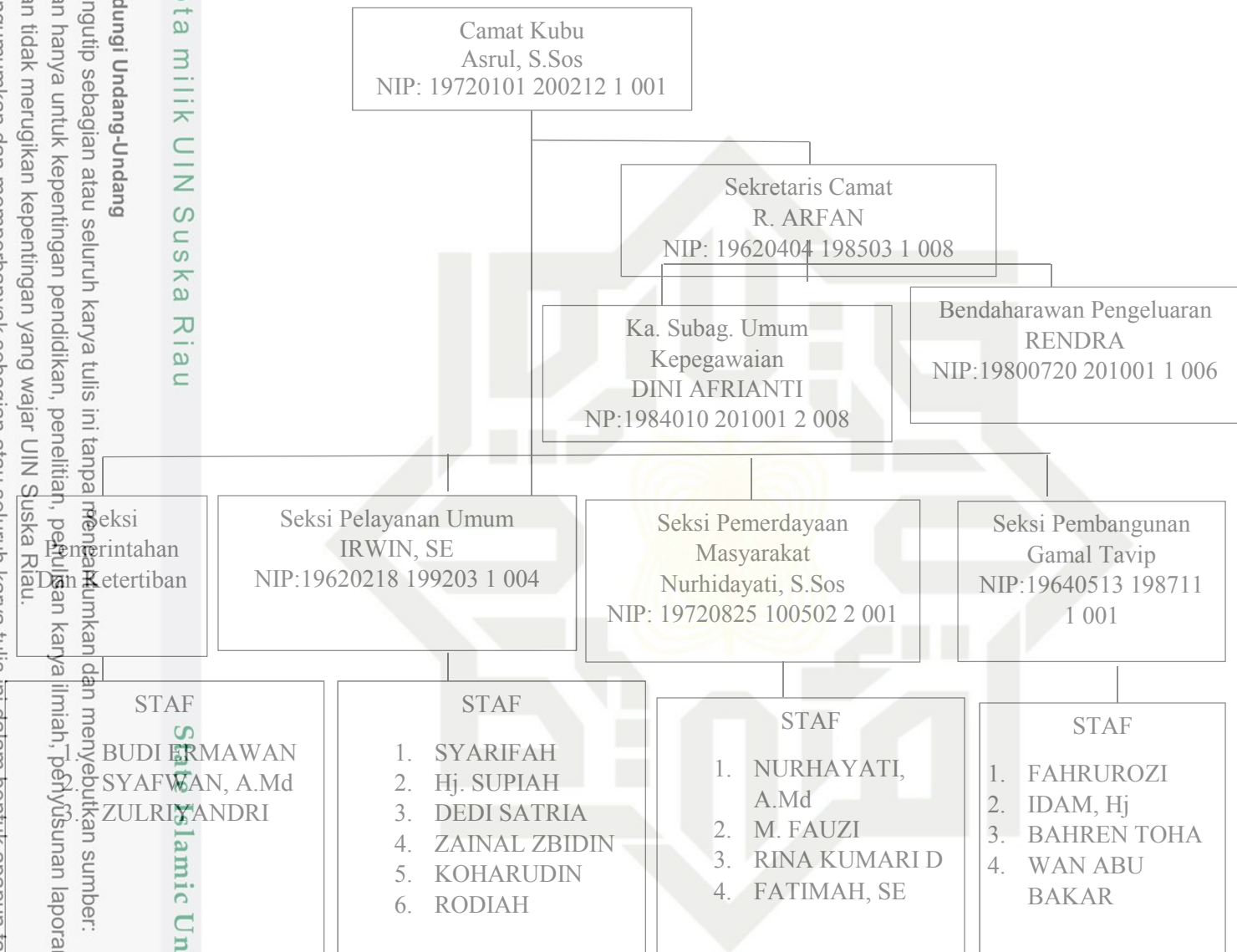
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar II.1
STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN KUBU



Sumber : Kantor Camat Kubu

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kecamatan Kubu memiliki sarana dan prasarana dibidang pendidikan yaitu dari tingkatan Taman Kanak-Kanak (TK) sebanyak 9 (Sembilan) Taman Kanak-kanak (TK) jumlah guru yang mengajar sebanyak 31 (tiga puluh satu) dan murid sebanyak 235 (duaratus tiga puluh lima), Sekolah Dasar Negeri (SD) jumlah sekolah 16 (enam belas) jumlah guru yang mengajar 129 (seratus dua puluh Sembilan) dan jumlah murid 1879 (seribu delapanratus tujuh puluh Sembilan), Madrasah/Ibtidayah jumlah sekolah 2 (dua) jumlah guru 24 (dua puluh empat) dan jumlah murid 658 (enamratus lima puluh delapan), Sekolah Dasar Swasta Umum 1 (satu) jumlah guru 5 (lima) dan jumlah murid 52 (lima puluh dua), Sekolah Lanjutan Pertama (SLTP) jumlah sekolah 2 (dua) jumlah guru 29 (dua puluh Sembilan) jumlah murid 256 (duaratus lima puluh enam), Madrasah/Tsanawiyah (MTS) jumlah sekolah 4 (empat) jumlah guru 30 (tiga puluh) dan jumlah murid 511 (limaratus sebelas), Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA) jumlah selolah SMTA Negeri 2 (dua) jumlah guru 26 (dua puluh enam) dan jumlah murid 603 (enamratus tiga), Madrasah/Aliah jumlah sekolah 1 (satu) jumlah guru 15 (limabelas) dan jumlah murid 215 (duaratus limabelas). Berikut merupakan nama-nama sekolah tingkat SD/MI dan SMP/MTS Negeri/swasta di kecamatan kubu³⁷:

³⁷ Observasi, Kantor Camat Kubu, Tanggal 29 Januari 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TABEL II.2
SDN KECAMATAN KUBU

No	Nama Sekolah	Nama Kepala Sekolah
1	SDN 001 Teluk Merbau	ISMAWATI, SP.d
2	SDN 002 Teluk Merbau	ERNI AMANI, SP.d
3	SDN 003 Rantau Panjang Kanan	LINDAWATI, SP.d
4	SDN 004 Sungai Kubu	MHD. BASRI, SP.d
5	SDN 005 Sei. Segajah Makmur	SUPIAH, SP.d
6	SDN 006 Sungai Segajah	ZUBAIDA, SP.d
7	SDN 007 Teluk Merbau	AZHAR, SP.d
8	SDN 008 Sungai Segajah	RIZATUL HIDAYAH,SP.d
9	SDN 009 Tanjung Leban	ZAHAERAH,SP.d
10	SDN 010 Teluk Piyai	MUSTADIR,SP.d
11	SDN 011 Sungai Kubu	M. JOHAR,A.Ma. SP.d
12	SDN 012 Sungai Segajah	SITI AMINAH,SP.d
13	SDN 013 Teluk Piyai	RAMLI SYAM,SP.d
14	SDN 014 Teluk Piyai Pesisir	AZIZAH,SP.d
15	SDN 015 Tanjung Leban	RIFAI,SP.d
16	SDN 016 Teluk Piyai Pesisir	JEMA'AN,SP.d
17	SDN 017 Teluk Piyai Pesisir	SAIFUDIN,SP.d
18	SDS Bondar Deras Sungai Segajah	MUSRIADI

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

19	SDS AL-Qhoir Sungai Segajah	RUSMAN
20	MI Muhamadiyah Sungai Segajah	
21	MI AL-Qur'an Teluk Piyai	
22	SMPN 1 Teluk Merbau	H. KARSONO
23	SMPN 2 Kubu Sungai Segajah Makmur	H. SYAMSUDIN, SP.d
24	MTS Nurul Islam Sungai Segajah	RAMLIYUS,SP.d.i
25	MTS AL-Qur'an Teluk Piyai	AMADIAN,SP.d.i
26	MTS Babusalam Teluk Piyai Pesisir	H.SYAIFUDIN HARAHAP,SP.d
27	MTS Nurul Hidayah Teluk Piyai Pesisir	RIONO,SP.d.i

Sumber : Kantor Kordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Kubu

B. Profil Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir

1. Latar Belakang

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial , ras, etnis, agama, dan gender. Pemerataan dan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki keterampilan hidup (*life skills*) sehingga memiliki kemampuan untuk mengenal dan mengatasi masalah diri



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan lingkungannya, mendorong tegaknya masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila³⁸.

Saat ini pembangunan pendidikan nasional belum mencapai hasil sesuai yang diharapkan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir selaku pemegang amanah pelaksanaan sistem pendidikan memiliki kewajiban untuk mewujudkan misi pembangunan tersebut. Manusia seperti apa yang ingin dibangun?. Perspektif pembangunan pendidikan tidak hanya ditujukan untuk mengembangkan aspek intelektual saja melainkan juga watak, moral, sosial dan fisik peserta didik, atau dengan kata lain menciptakan manusia Indonesia seutuhnya. Selain itu, peningkatan kualitas dan kapasitas sarana prasarana pendidikan juga mempunyai peranan penting dalam peningkatan pembangunan dunia pendidikan. Semua itu tentunya perlu perencanaan dan pengendalian yang strategis dan kontinyu.

Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang terdiri atas RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD. Rencana Startegis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir adalah dokumen perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk periode lima tahun. Renstra disusun

³⁸ Observasi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir Bagan Siapi-api, Tanggal 28 Januari 2020



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuai dengan tugas dan fungsi (tupoksi) serta berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Rokan Hilir dan bersifat indikatif³⁹.

Tahapan-tahapan penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir meliputi,

1. Persiapan penyusunan Renstra
2. Penyusunan rancangan Renstra
3. Penyusunan rancangan akhir Renstra, dan
4. Penetapan Renstra.

Perumusan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir mencakup,

1. Pengolahan data dan informasi.
2. Analisis gambaran pelayanan.
3. Review Renstra kemeterian/lembaga dan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau.
4. Perumusan isu-isu strategis.
5. Perumusan Visi dan Misi.
6. Mempelajari surat edaran Bupati perihal penyusunan rancangan Renstra SKPD kabupaten beserta lampirannya, yaitu rancangan awal RPJMD kabupaten yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-SKPD kabupaten.

³⁹ Observasi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir Bagan Siapi-
api Tanggal 28 Januari 2020



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD kabupaten yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

8. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun.

9. Perumusan indikator kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten.

Perumusan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan proses yang tidak terpisahkan dan dilakukan bersamaan dengan tahap perumusan rancangan awal RPJMD sebagai acuan penyusunan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang merupakan perencanaan tahunan.

2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan azas otonomi daerah. Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut,

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Merumuskan program kerja dan kegiatan dibidang pendidikan dan kebudayaan berdasarkan wewenang yang telah dilimpahkan sebagai target kinerja;
- 2) Mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja dinas kepada sekretaris, bidang-bidang berdasarkan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan renstra;
- 3) Membina menejerial dan teknis bagi bidang-bidang, pendidik dan tenaga kependidikan, unit pelaksana teknis dinas, pengawas sekolah serta satuan pendidikan dilingkungan dinas pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan ketentuan agar terwujudnya pendidikan yang kualitas;
- 4) Mengarahkan dan memberi petunjuk kepada masing-masing bidang, pengawas sekolah dan UPT tentang rencana kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis agar terlaksananya program kerja;
- 5) Penetapan visi misi dan program kerja dinas pendidikan sesuai dengan renstra Pendidikan dan Kebudayaan sebagai target kinerja;
- 6) Mengadakan kerjasama dengan instansi/unit kerja lain tentang pelaksanaan program kegiatan, pembinaan, bimtek, pengawasan, fasilitasi berdasarkan SOTK agar program kerja yang telah ditetapkan berjalan lancar;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7) Melaksanakan pembinaan pegawai dilingkuangan dinas pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan aturan yang berlaku agar terciptanya ASN Pendidikan dan Kebudayaan yang berkualitas;
- 8) Menilai prestasi bawahan sesuai dengan kemampuan dan kinerja sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier.⁴⁰
- 9) Melaksanakan koordinasi antar lembaga/intensi, badan usaha dan perangkat daerah terkait berdasarkan MOU agar tercapainya tujuan pendidikan dan kebudayaan;
- 10) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi agar sasaran program kerja dapat tercapai;
- 11) Melaporkan pelaksanaan tugas dibidang pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan target kinerja sebagai bentuk pertanggung jawaban guna bahan pertimbangan, evaluasi dan rencana pengembangan pendidikan dan kebudayaan masa yang akan datang;
- 12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai tugas dan fungsinya⁴¹.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi

⁴⁰ Observasi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir Bagan Siapi-api, Tanggal 28 Januari 2020

⁴¹ Observasi, Dinas Pendidikan dan Kecamatan Kabupaten Rokan Hilir Bagan Siapi-api, Tanggal 28 Januari 2020



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

umum kepegawaian, keuangan dan perlengkapan, perencanaan program, pendataan dan pelaporan.

3. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal

Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan nonformal, mempunyai tugas pokok menetapkan pedoman penyelenggaraan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan luar sekolah atau Pendidikan nonformal;

4. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar

Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar mempunyai tugas pokok mengembangkan upaya perbaikan, perluasan, pendalaman, penyesuaian pada Pendidikan Sekolah Dasar peningkatan mutu baik penyelenggaraan kegiatan pendidikan maupun peralatan penunjangnya serta mengkoordinasikan pelaksanaan kurikulum dengan pendidik dan pendayagunaan sarana dan prasarana yang ada.

5. Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas pokok mengembangkan upaya perbaikan, perluasan, pendalaman, penyesuaian pada Pendidikan Sekolah Menengah Pertama peningkatan mutu baik penyelenggaraan kegiatan pendidikan maupun peralatan penunjangnya serta mengkoordinasikan pelaksanaan kurikulum dengan pendidik dan pendayagunaan sarana dan prasarana yang ada⁴².

⁴² Observasi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir Bagan Siapi-
ap, Tanggal 28 Januari 2020

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bidang Kebudayaan

Bidang Kebudayaan mempunyai tugas pokok mengembangkan upaya perbaikan, perluasan, pendalaman, penyesuaian pada kebudayaan melalui peningkatan mutu baik penyelenggaraan kegiatan kebudayaan dan kesenian daerah maupun pembinaan kesenian budaya daerah serta mengkoordinasikan pelaksanaan pengembangan, pengelolaan dan pembinaan kebudayaan daerah dan kesenian pada pendidikan.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Kebudayaan, mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Merencanakan operasional bidang Kebudayaan sesuai dengan rencana kerja dinas yang telah ditetapkan sebagai target kinerja;
- 2) Membagi tugas kepada seksi-seksi sesuai tugas pokok dan fungsi agar tugas Bidang Kebudayaan berjalan lancar;
- 3) Memberi petunjuk kepada bawahan tentang pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi agar kegiatan terlaksana dengan baik;
- 4) Merumuskan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten/kota, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian berdasarkan visi misi pendidikan dan kebudayaana agar sesuai dengan target kinerja;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Melaksanakan pembinaan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten/kota, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian berdasarkan berdasarkan wewenang yang dilimpahkan agar tujuan renstra dapat tercapai;
- 6) Membuat program kegiatan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota sesuai dengan misi pendidikan dan kebudayaan agar peran serta masyarakat dapat di wadahi;
- 7) Membuat program kerja pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten/kota sesuai dengan tatanilai budaya setempat agar nilai nilai tradisi dapat dilestarikan;
- 8) Melaksanakan pembinaan komunitas dan lembaga adat yang masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten/kota sesuai aturan yang berlaku agar budaya yang dianut tetap lestari;
- 9) Melaksanakan pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota sesuai dengan budaya tempatan agar kesenian daerah tetap lestari;
- 10) Menetapkan cagar budaya dan pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten/kota sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan agar cagar budaya yang ada dapat dilestarikan;



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 11) Melaksanakan pengelolaan museum kabupaten/kota berdasarkan peraturan yang berlaku agar peninggalan cagar budaya diketahui oleh segenap lapisan masyarakat;
- 12) Memfasilitasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten/kota, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian berdasarkan tupoksi dinas pendidikan dan kebudayaan agar menjadi media pembelajaran masyarakat;
- 13) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten/kota, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian sesuai dengan wewenang yang diberikan agar pelestariannya tetap bekesinambungan;
- 14) Menyusun rencana kegiatan dan anggaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan alokasi dana yang telah ditetapkan agar tercapainya target renstra pendidikan dan kebudayaan;
- 15) Melaksanakan pendataan dan pelaporan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai bahan pertimbangan dan pelaporan kepada atasan;
- 16) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung sesuai dengan tugas masing-masing agar terciptanya nuansa kerja yang baik;



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 17) Menilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier sesuai dengan ketentuan agar meningkatnya kinerja bawahan;
- 18) Mengevaluasi program kerja yang telah ditetapkan berdasarkan pemantauan realisasi kegiatan sebagai pembanding prestasi kerja dari kegiatan sebelumnya untuk bahan laporan;
- 19) Membuat laporan dari hasil pelaksanaan tugas kegiatan Bidang Kebudayaan sesuai ketentuan sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada atasan;
- 20) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya⁴³.

7. Bidang Pembinaan Ketenagaan

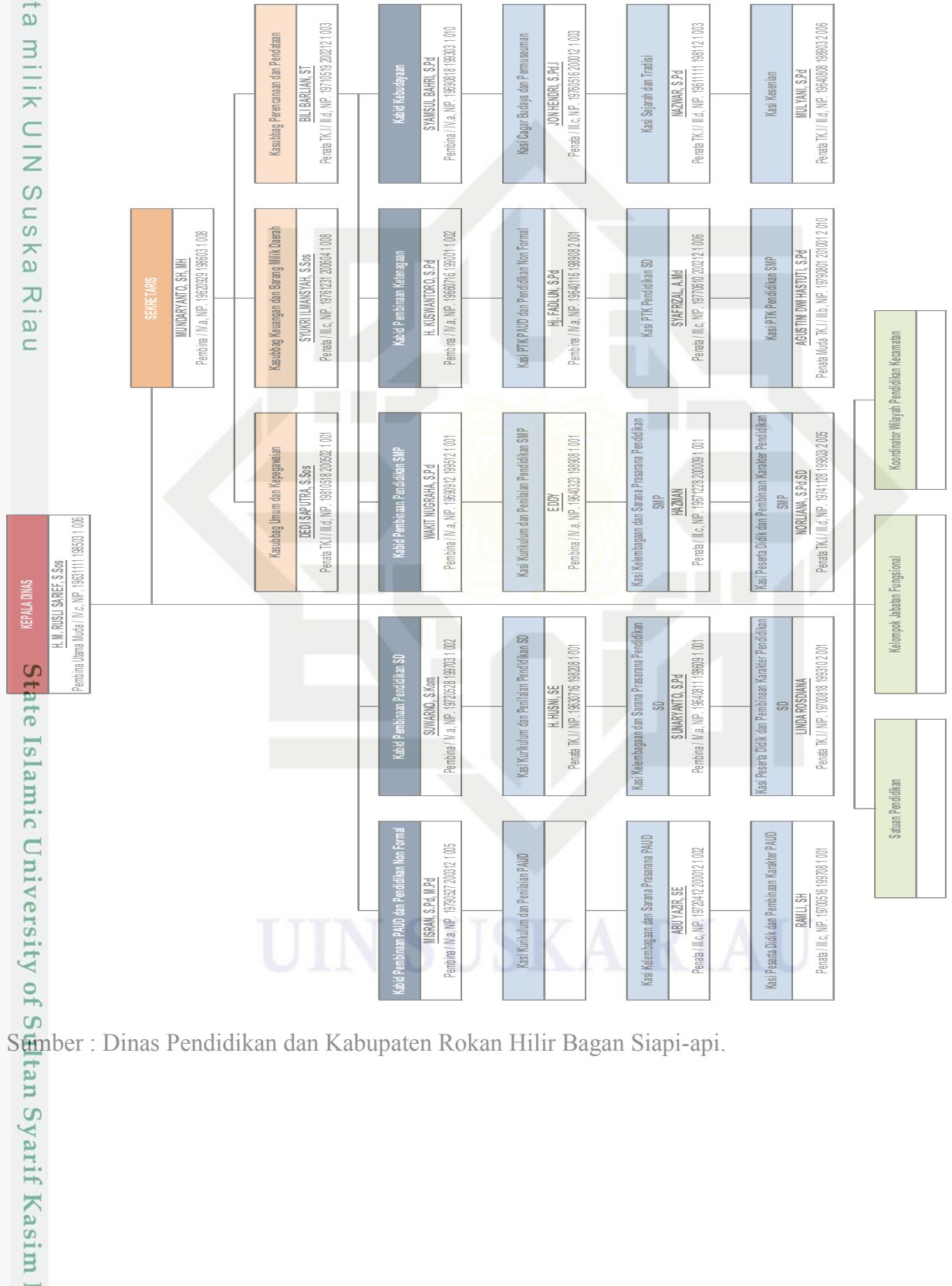
Bidang Pembinaan Ketenagaan mempunyai tugas pokok mengembangkan Melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal serta urusan pelaksanaan penyelenggaraan pembantuan Pendidikan menengah atas dan budaya.

UIN SUSKA RIAU

⁴³ Observasi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir Bagan Siapi-api, Tanggal 28 Januari 2020

Gambar II.3

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Visi dan Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan

Hilir

a. Visi

Terwujudnya pendidikan yang berkualitas, berkarakter dilandasi nilai-nilai budaya luhur, Penjelasan Visi yang dikemukakan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan pendidikan yang merata serta kelembagaan pendidikan yang bermutu.
2. Pengelolaan kelembagaan pendidikan yang berkualitas, terampil, kreatif, dan inovatif yang berlandaskan nilai-nilai budaya luhur.
3. Mewujudkan kurikulum satuan pendidikan dengan kegiatan pengenalan budaya daerah.

b. Misi

Berdasarkan Visi yang telah dipaparkan, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir memiliki Misi sebagai berikut :

1. Terselenggaranya satuan pendidikan yang merata, unggul dan bermutu untuk semua jenis dan jenjang pendidikan.
2. Meningkatnya Profesionalisme dan Mutu Tenaga Pendidik.
3. Mewujudkan Pelestarian Kebudayaan.
4. Mewujudkan Kinerja Kelembagaan yang Handal dan Bersih⁴⁴

⁴⁴ Observasi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir bagan Siapi-api, Tanggal 28 Januari 2020



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Pemerintahan Daerah

1. Pengertian Pemerintahan Daerah

Otonomi Daerah terdiri atas dua kata yaitu otonomi dan daerah, otonomi berasal dari bahasa Yunani (*autonomy* dan *nomous*). kata *autonomy* berarti sendiri dan *nomous* berarti hukum atau peraturan, maka otonomi berarti memiliki aturan sendiri sedangkan daerah berarti wilayah, jadi otonomi daerah secara etimologi ialah daerah yang memiliki peraturan sendiri.⁴⁵

Ni'matul Huda menyatakan bahwa otonomi adalah tatanan yang bersangkutan dengan cara-cara membagi wewenang, tugas dan tanggungjawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara pusat dan daerah. Salah satu penjelmaan pembagian tersebut berupa, daerah-daerah akan memiliki sejumlah urusan pemerintah baik atas dasar penyerahan atau pengakuan ataupun yang dibiarkan sebagai urusan rumah tangga daerah⁴⁶. Berbicara masalah otonomi daerah maka tidak terlepas dengan namanya pemerintahan daerah

Menurut W.S Sayre Pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari Negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Selanjutnya menurut David Apter, Pemerintah adalah satuan

⁴⁵ Abu Samah dan Ali bi Embi, *Hukum Pemerintahan Daerah dan Desa di Indonesia*, (Pekanbaru: STIE Lukman Edy, 2016), h. 1

⁴⁶ Ni'matul Huda, *Hukum pemerintahan Daerah*, (Bandung: Nusa Media, 2009), Cet. Ke-1, 84

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya dan monopoli praktis yang menyangkut kekuasaan paksaannya.⁴⁷

Berdasarkan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud dengan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan tugas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.⁴⁸

Sedangkan yang dikatakan Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah lainnya sebagai Unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.⁴⁹

C.F Strong yang menyebutkan bahwa pemerintahan daerah adalah organisasi dimana diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi. Pemerintahan dalam arti luas merupakan sesuatu yang lebih besar daripada suatu badan atau kelompok.⁵⁰

pemerintahan daerah memiliki eksistensi sebagai :

⁴⁷ Inu Kencana Syafie, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, (Jakarta: Refika Aditama, 2010), h. 1

⁴⁸ Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

⁴⁹ Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

⁵⁰ Ni'matull Huda, *Hukum Pemerintah Daerah*, (Bandung: Nusamedia, 2012), h. 28.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. *Local Self Government* atau pemerintah lokal daerah dalam sistem pemerintah daerah di Indonesia adalah semua daerah dengan berbagai urusan otonom bagi *local self government* tentunya harus berada dalam kerangka sistem pemerintahan negara. Dalam mengurus rumah tangganya sendiri pemerintah lokal mempunyai hak inisiatif sendiri, mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri atas kebijaksanaannya sendiri. Selain disertai urusan-urusan tertentu oleh pemerintah pusat, dapat juga disertai tugas-tugas pembantuan dalam lapangan pemerintahan (*tugas medebewind*). Tugas ini adalah untuk turutserta (*made*) melaksanakan peraturan perundang-undangan, bukan hanya yang ditetapkan oleh pemerintah pusat saja, melainkan juga yang ditentukan oleh pemerintah lokal yang mengurus rumah tangga sendiri tingkat di atasnya;
- b. *Local State Government* atau pemerintah lokal administratif dibentuk karena penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan negara yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah pusat. Penyelenggaraan pemerintahan semacam ini disebabkan karena sangat luasnya wilayah dan banyaknya urusan pemerintahan. Pejabat-pejabat yang memimpin pemerintah lokal administratif itu diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat, bekerja menurut aturan-aturan dan kehendak dari pemerintah pusat, berdasarkan hierarki kepegawaian, ditempatkan di wilayah-wilayah administratif yang bersangkutan dibantu oleh pegawai-pegawai yang juga diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Segala pembiayaan pemerintah lokal administratif dikeluarkan oleh pemerintah pusat.⁵¹

2. Kewenangan Pemerintah Daerah

Merunut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata kewenangan mengandung arti :

- (1) Hal wewenang
- (2) Hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu.

Sedangkan kata wewenang mengandung arti :

- (1) Hak dan kekuasaan untuk bertindak
- (2) Kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.⁵²

Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda “bevoegdheid” (yang berarti wewenang atau berkuasa). Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perihal kewenangan dapat dilihat dari Konstitusi Negara yang memberikan legitimasi kepada Badan Publik dan Lembaga Negara dalam menjalankan fungsinya. Wewenang

⁵¹ Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah cetakan ke 3*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006), h. 77.

⁵² Juniarso Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Bandung: Nuansa, 2012), h. 143

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh Undang-Undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.⁵³

Dalam Undang-Undang Nomor diakatan bahwa pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu.⁵⁴

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
- e. Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
- f. Sosial.

Kewenangan daerah mencakup seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan dibidang lainnya yang meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara macro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pemberdayaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan standardisasi nasional. Kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka desentralisasi harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan,

⁵³ SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, (Jakarta: Liberty, 1997), h. 154.

⁵⁴ Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewenangan yang diserahkan tersebut.⁵⁵

3. Asas-asas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Asas merupakan salah satu yang menjadi dasar di dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan, begitu juga dengan pemerintahan daerah yang memiliki asas-asas sebagai berikut:

a. Asas Sentralisasi

Suatu asas pemerintahan yang terpusat, artinya ialah tidak dikenal adanya penyerahan wewenang atau urusan pemerintahan kepada bagian-bagian daerah. Semua kewenangan pemerintah baik pusat maupun daerah berada dibawah tangan pemerintahan pusat, jika adapun kewenangan untuk pemerintahan daerah itupun menjalankan perintah dari pusat.⁵⁶

Asas sentralisasi ini juga memiliki kekurangan dan kelebihan, yaitu sebagai berikut:

1. Kelebihan

- a) Menjadi alat yang ampuh dari kesatuan politik persekutuan atau masyarakat;
- b) Dapat dipergunakan sebagai sarana untuk mencegah timbulnya keinginan dari bagian-bagian negara untuk melepaskan diri dan dapat pula dipergunakan sebagai sarana untuk memperkuat persatuan;

⁵⁵ C.S.T Kansil, Pemerintahan Daerah Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 83.

⁵⁶ B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015), Cet.ke-1, h. 289

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Mempercepat persamaan dalam perundang-undangan, pemerintahan sepanjang kepentingan wilayah mempunyai sifat yang sejenis;
- d) Lebih mengutamakan kepentingan keseluruhan (nasional) di atas kepentingan-kepentingan dari bagian-bagian;
- e) Sebagai saran untuk mengumpulkan tenaga dari masing-masing bagian yang tidak kuat menjadi kuat.

2. Kekurangan

- a) Mengakibatkan rentang birokrasi yang semakin panjang dengan segala keuntungan dan kerugian yang melekat;
- b) Karena urusan negara semakin kompleks maka tanggungjawab pemerinyahan pusat semakin berat;
- c) Pengambilan keputusan untuk masalah di daerah menjadi sulit karena pusat yang menentukan;
- d) Pengambilan keputusan cenderung diseragamkan;
- e) Terhambatnya proses demokratisasi dan pemancaran kekuasaan;
- f) Daerah tidak memiliki alternatif pilhan kecuali hanya menerima kebijakan dari pusat;

b. Asas Desantralisasi

Asas ini ialah asas yang menghendaki dalam penyelenggaraan pemerintahan ada sebagian wewenang atau urusan pusat dilimpahkan dan diserahkan ke pemerintahan daerah untuk mengatur rumah tangga sendiri. Menurut Hans Kelsen yang dikutip oleh B.Hestu Cipto Handoyo, bahwa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengertian desentralisasi itu berkaitan dengan pengertian negara, karena desentralisasi menyangkut berlakunya sistem tatanan hukum dalam suatu Negara.⁵⁷ Dalam asas desentralisasi juga terdapat kelebihan dan kekurangan, yaitu:

1. Kelebihan
 - a) Memberikan penilaian yang relatif tepat pada sifat yang berbeda-beda dari wilayah dan penduduk suatu Negara;
 - b) Sebagai senjata yang ampuh untuk memberantas system birokrasi yang bertingkat-tingkat;
 - c) Dalam pelaksanaan *welfare state* dapat meringankan beban dari pemerintahan pusat;
 - d) Daerah dan rakyat yang ada didalamnya menjadi objek untuk pengambilan keputusan dalam peraturan;
 - e) Merupakan saran yang tepat untuk pemenuhan sarana demokrasi;
 - f) Merupakan saran yang tepat untuk megimplementasikan konsep negara hukum.
2. Kelemahan
 - a) Membuka kemungkinan daerah-daerah untuk melepaskan diri dari ikatan pemerintahan pusat;
 - b) Membuka kemungkinan terjadinya ketegangan hubungan (*spanning*) antara pusat dan daerah;

⁵⁷Ibid , h. 293

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Membuka kemungkinan timbulnya ketimpangan pertumbuhan dan perkembangan diantara masing-masing bagian;
- d) Membuka kemungkinan timbulnya fanatisme kedaerahan;
- a. Asas Dekonsentrasi

Asas ini merupakan pada hakikatnya ialah bentuk penghalusan dari asas sentralisasi, karena dalam penyelenggaraan dan perannya pemerintahan pusat masih mendominasi di dalam konsep asas ini. Dalam pelaksanaan asas dekonsentrasi ini pemerintah pusat menempatkan pejabat-pejabatnya di daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan pusat. Dengan demikian di dalam asas ini yang ditekankan ialah aspek pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat kepada pejabat-pejabat pemerintahan pusat yang menjalankan wewenang di daerah.⁵⁸

Ditinjau dari konsep ini maka asas dekonsentrasi itu pada hakikatnya terkandung didalamnya:

- a) Merupakan manifestasi penyelenggaraan pemerintahan negara yang mempergunakan asas sentralisasi yang sempit.
- b) Merupakan manifestasi pelimpahan wewenang pemerintahan dari pemerintah ke pejabat-pejabatnya di daerah.
- c) Merupakan manifestasi penyelenggaraan tata laksana pemerintahan umum pusat di daerah.

⁵⁸*Ibid*, h. 302-303

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d) Dalam pelaksanaannya, asas dekonsentrasi tidak mengakibatkan adanya kewenangan dari suatu daerah atau organ pemerintahan untuk menentukan sendiri kebijaksanaan, atau dengan kata lain memiliki otonomi.

b. Asas Madebewind (Asas Tugas Pembantuan)

Menurut B. Hestu Cipto Handoyo, Asas Madebewind ini merupakan bentuk dari asas desentralisasi atau otonomi tidak penuh. Oleh sebab itu sebenarnya kebijaksanaan pemekaran daerah yang menimbulkan konflik ditingkat masyarakat dapat dilakukan dengan mempergunakan asas ini terlebih dahulu.⁵⁹ Namun saat ini justru pemekaran daerah tidak dilalui dengan langkah uji coba melalui asas madebiwind, sehingga secara empiris daerah-daerah hasil pemekaran itu tidak menunjukkan kesiapan untuk melaksanakan otonomi penuh.

B. Teori Kewenangan

Kewenangam di dalam berbagai literatur sudah dikenal begitu mendasar, dimana kewenangan atau wewenang menjadi salah satu unsur di dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan dalam menjalankan kekuasaannya. Kekuasaan dalam terminologi hukum dikenal sebagai istilah kewenangan. Dalam konteks hukum administrasi, wewenang diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu atau melaksanakan hukum positif

⁵⁹*Ibid*, h. 306



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hingga dapat menciptakan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara.⁶⁰

Kata “ Wewenang ” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, memiliki arti:

- a) Hak dan kekuasaan untuk bertindak;
- b) Kekuasaan untuk membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggungjawab kepada orang lain;
- c) Fungsi yang boleh dilaksanakan;⁶¹

Sedangkan “ Kewenangan ” memiliki arti :⁶²

- a) Hak bewenang;
- b) Hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu;

Kekuasaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti:

- a) Kuasa (Untuk Mengurus, memerintah dan sebagainya);
- b) Kemampuan, kesanggupan;
- c) Daerah (tempat) yang dikuasai;
- d) Kemampuan orang atau golongan untuk menguasai orang atau golongan lain berdasar kan kewibawaan, kewenangan karisma atau kekuasaan fisik;
- e) Fungsi menciptakan dan menetapkan kedamaian, keadilan atau ketidakadilan;⁶³

⁶⁰ Aulia Rahman, *Politik Hukum Pencegahan dan Penanggulangan Judicial Corruption Lembaga Peradilan*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2017), Cet.ke-1, h. 22-23

⁶¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, cetakan pertama edisi ke III (Jakarta: Balai Pustaka) ,h.

⁶² *Ibid*,h.1272

⁶³ *Ibid*, h.604

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Soerjono Soekanto menguraikan bahwa beda antara kekuasaan dan kewenangan bahwa, setiap kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain dapat dinamakan kekuasaan, sedangkan kewenangan adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai dukungan atau mendapat pengakuan dari masyarakat.⁶⁴

Nur Basuki Winamo menyatakan bahwa, kewenangan atau wewenang itu dalam konsep hukum publik sekurang-kurangnya memiliki tiga komponen yaitu:

1. Komponen Pengaruh, yaitu komponen dalam penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum.
2. Komponen dasar hukum, yaitu komponen wewenang itu selalu dapat ditunjukkan dasar hukumnya.
3. Komponen Konformitas, yaitu mengandung makna adanya standar wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis kewenangan tertentu).

Mekanisme untuk memperoleh sebuah kewenangan tergolong atas tiga jenis yaitu, atribusi, delegasi ataupun mandat. Ketiga jenis mekanisme ini memiliki konsep yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Jika kewenangan yang diberikan kepada suatu lembaga atau organisasi itu merupakan delegasi, maka berarti itu merupakan kewenangan organ yang lain dilimpahkan kepadanya. Sebaliknya berbeda dengan kewenangan berdasarkan mandat,

⁶⁴Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 91-92



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewenangan berdasarkan mandat yaitu kewenangan dari suatu organ yang mengizinkan lembaga lain untuk menjalankannya.

Jimly Asshiddiqie menerangkan bahwa kewenangan yang dimiliki oleh suatu lembaga negara dapat saja berpindah kepada lembaga lain karena pemberian mandat (*mandatory*) atau karena pelimpahan wewenang (*transfer of power*). Apabila suatu kewenangan dimandatkan kepada suatu lembaga lain untuk melaksanakannya atas nama pemberi mandat, maka lembaga pemberi mandat atau *mandatory* itu dapat saja menarik kembali mandatnya itu sewaktu-waktu dari lembaga penerima mandat. Akan tetapi, di dalam teori tentang pendelegasian, maka pelimpahan kewenangan dari suatu lembaga kepada lembaga lain berakibat terjadinya perpindahan kewenangan secara mutlak.⁶⁵

Kewenangan yang sudah didelegasikan kepada lembaga lain itu tidak dapat lagi ditarik kembali oleh lembaga pemberi delegasi. Begitu kekuasaan telah dilimpahkan kepada lembaga lain, maka lembaga penerima limpahan kewenangan itulah penyandang tugas dan kewenangan hukum atas kekuasaan yang telah dilimpahkan itu.⁶⁶

Perbedaan antara kewenangan delegasi dan mandat di atas maka dapat dibuat perbandingan sebagai berikut:⁶⁷

⁶⁵Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2014), Cet. Ke-3, h. 264

⁶⁶*Ibid*

⁶⁷Aulia Rahman, *Loc.cit* h. 23

Tabel III. 1
Perbandingan Delegasi dan Mandat

	Delegasi	Mandat
1	Pelimpahan wewenang	Perintah untuk melaksanakan
2	Tidak dapat dilaksanakan secara insidental oleh organ pemilik kewenangan asli.	Kewenangan dapat sekali-kali dijalankan oleh mandate
3	Terjadi peralihan tanggung jawab.	Tidak terjadi peralihan tanggung jawab.
4	Harus berdasarkan undang-undang.	Tidak harus berdasarkan undang-undang.
5	Harus tertulis	Tidak harus tertulis.

Menurut Firmansyah Arifin yang dikutip oleh Aulia Rahman, menyatakan bahwa kewenangan secara teori dapat menimbulkan sifat kategorikal dan eksklusif pada setiap pemegang kewenangan. Sifat kategorikal merupakan unsur yang membedakan lembaga negara yang memiliki dan tidak memiliki kewenangan, dan sifat eksklusif menjadikan lembaga yang tidak disebut menjadi lembaga tidak berwenang, hingga akibat dari setiap perbuatan yang dilakukan diluar kewenangan menjadi batal demi hukum dan tidak berakibat hukum.⁶⁸

C Pengertian Pendidikan, Guru, Muatan Lokal dan Kebudayaan

1. Pendidikan

⁶⁸*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendidikan adalah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan atau pelatihan⁶⁹. Menurut etimologi kata pendidikan itu sendiri berasal dari Bahasa latin yaitu *ducare*, berarti menuntun, mengarahkan, atau memimpin dan awalan *e*, berate keluar. Berikut ialah pengertian pendidikan menurut beberapa ahli :

- a. Prof. H. Mahmud Yunus

Yang dimaksud pendidikan ialah suatu usaha yang dengan sengaja dipilih untuk mempengaruhi dan membantu anak yang bertujuan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, jasmani dan akhlak sehingga secara perlahan bisa mengantarkan anak kepada tujuan dan cita-citanya yang paling tinggi

- b. KI Hajar Dewantara

Menurutnya pendidikan adalah suatu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya ialah bahwa pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik agar sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup setinggi-tingginya

⁶⁹ Pendidikan diakses pada 16 Februari 2020 dari <https://id.m.wikipedia.org/wiki/pendidikan>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Plato

Pendidikan adalah sesuatu yang dapat membantu perkembangan individu dari jasmani dan akal dengan sesuatu yang dapat memungkinkan tercapainya sebuah sebuah kesempurnaan⁷⁰

Pengertian pendidikan menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat (1) pendidikan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi di dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diberikan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara⁷¹. Sementara penyelenggara pendidikan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan formal⁷²

2. Guru

Menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 1 ayat (1) guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan

⁷⁰ Pengertian Pendidikan Menurut Para Ahli di akses pada 16 Februari 2020
<https://WWW.Seputarpengetahuan.co.id/2015/02/15-Pengertian-Pendidikan-Menurut-Para-Ahli.html>

⁷¹ Undang-undang No 20 Tahun 2020 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat (1)

⁷² Undang-undang No14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Paal 1 Ayat (5)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah⁷³

3. Muatan Lokal

Muatan lokal adalah muatan untuk mengembangkan potensi daerah sebagai sebagian dari upaya peningkatan mutu pendidikan disekolah. Selain itu muatan lokal juga sebagai upaya untuk melestarikan bahasa daerah yang berbasis kebudayaan kesenian pada daerah dimana sekolah itu berkembang. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 Tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 Pasal 1 ayat (1) Muatan lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal⁷⁴.

4. Kebudayaan

Budaya atau kebudayaan berasal dari Bahasa sansekerta yaitu *buddhayah*, yang merupakan bentuk jamak dari *buddhi* (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi, dan akal manusia. Bentuk lain dari bahasa inggris yaitu *culture* dan Bahasa latin *cultura*⁷⁵. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Pasal 1 ayat (1) kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat, Ayat (2) Kebudayaan Nasional Indonesia adalah keseluruhan proses dan

⁷³ Undang-undang No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Pasal 1 Ayat (1)

⁷⁴ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 79 Tahun 2014 Tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 Pasal 1 Ayat (1)

⁷⁵ Kebudayaan diakses pada 17 Februari 2020 <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Budaya>

hasil interaksi antar kebudayaan yang hidup dan berkembang di indonesia



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pembelajaran Muatan Lokal Budaya Melayu Rokan Hilir Pasal 11 Ayat (2) belum berjalan. Bahwa belum adanya pengangkatan dan Pelatihan guru muatan lokal budaya melayu Rokan Hilir.
2. Penyebab tidak berjalannya yaitu karena kurangnya sosialisasi, keterbatasan anggaran dan kurangnya keseriusan Pemerintah / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir dalam pengangkatan dan pelatihan terhadap guru-guru muatan lokal

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan agar terlaksananya pengangkatan gu-guru muatan lokal dan banyaknya pengajar yang ahli dibidangnya maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir untuk sesegera mungkin mensosialisasikan Peraturan Bupati tersebut kesemua Pihak yang bersangkutan seperti LAM dan guru-guru serta Kepala Sekolah. Dengan mensosialisasikan bisa saja Pihak LAM dabat

memberikan masukan dan solusi agar terbinanya dan terciptanya Guru-guru yang berkualitas, berpengalaman dan mempuni dibidangnya hingga dinas pendidikan dapat langsung mengangkat dan meletakkan guru-guru ke sekolah-sekolah yang tidak memiliki guru muatan lokal.

2. Diharapkan juga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir untuk memberikan beasiswa khusus putra/putri daerah untuk di masukkan ke Fakultas Kebudayaan agar sumber daya manusia makin mempuni jika mempunyai basik di bidangnya ditambah lagi dengan pengetahuan budaya dilingkungannya. Serta dapat menujung dan tetap melestarikan adat istiadat dan kebiasaan masyarakat melayu Rokan Hilir

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Ridwan Halim, 1987, *Hukum Adat Dalam Tanya Jawab*, (Jakarta: Balai Aksara)
- Abu Samah dan Ali bi Embi, 2016, *Hukum Pemerintahan Daerah dan Desa di Indonesia*,(Pekanbaru: STIE Lukman Edy)
- Ali Zainuddin. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta : Sinar Grafika).
- Aminuddin Ilmar, 2014, *Hukum Tata Pemerintahan*, (Jakarta: Kencana)
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta : Rajawali Pers).
- Angraini Lisa.2014. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pekanbaru: (Suska Press)
- Aulia Rahman, 2017, *Politik Hukum Pencegahan dan Penanggulangan Judicial Corruption Lembaga Peradilan*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada)
- C.S.T Kansil, 2004, *Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika)
- Djamanat Samosir, 2013, *Hukum adat Indonesia*, (Medan: Nuansa Aulia)
- HR Ridwan. 2007. *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT RajaGrafindo)
- Hestu Cipto Handoyo, 2015, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka)
- Huda Ni'matul. 2009. *Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangannya Dan Problematikannya*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Inu Kencana Syafie, 2010, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, (Jakarta: Refika Aditama)
- Jimlly Asshiddiqie. 2017. *Pengantar Ilmu hukum Tata Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada depok.)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- _____, 2014, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada)
- Juniarso Ridwan, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, (Bandung: Nuansa)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan Pertama Edisi Ke III (Jakarta: Balai Pustaka)
- Erwan Agus dan Dyah Ratih, 2012, *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia*, (Yogyakarta:Grava Media, Cetakan Pertama)
- Kaho Josef Riwu. 2002. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Jakarrta: (PT RajaGrafindo Persada).*
- Ni'matul Huda, 2009, *Hukum pemerintahan Daerah*, (Bandung: Nusa Media)
- Samah Abu, 2018. *Hukum Kebijakan Publik*, pekanbaru
- Sarundajang, 2006, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah cetakan ke 3*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan)
- SF. Marbun,1997, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty)
- Soekanto Soerjono. 1982. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta : UII Press, 1982).
- _____, 2003, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantatif Dan Kualitatif Dan R&D*. (Bandung : Alfabeta).
- Suratman dan Phillips Dillah. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. (Bandung : Alfabet).
- Tilaar H.A.R. 2009. *Kekuasaan Dan Pendidikan Manajemen Pendidikan Nasional Dalam Pusaran Kekuasaan*. (Jakarta: Pt Rineka Cipta).
- Wijdjaja HAW. 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-undang No 20 Tahun 2020 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-undang No14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 79 Tahun 2014 Tentang Muatan lokal Kurikulum 2013

Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pembelajaran Muatan Lokal Budaya Rokan Hilir

Peraturan Gubernur Riau Nomor 72 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Pembelajaran Muatan Lokal Budaya Melayu Riau

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Juniar Wibisana, *Makalah Keputusan dan Ketetapan HAN*, Artikel diakses pada 19 Februari 2018 dari juniarwibisana.blogspot.com

Adi Condro Bawono, *Perbedaan Keputusan dengan Penetapan*, Artikel diakses pada 19 Februari 2018 dari hukumonline.com.

Bahsan Mustafa, *Hukum Administrasi Negara*, Artikel diakses pada 19 Februari 2018 dari kampushukum.com

Pendidikan diakses dari <http://id.m.wikipedia.org/wiki/pendidikan> pada tgl 16 Februari 2020

DOKUMENTASI SELAMA PENELITIAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



Penelitian dan wawancara serta wawancara dengan kepala-kepala sekolah SD di Kecamatan Kubu



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI PENELITIAN DI KECAMATAN KUBU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi dengan Kabag Tata Usaha Kecamatan Kubu dalam pengambilan berkas Profile Kecamatan Kubu



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dokumentasi penelitian di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kanupaten
Rokan Hilir



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI PENELITIAN DI LAM (LEMBAGA ADAT MELAYU) KABUPATEN ROKAN HILIR BERSAMA BAPAK H RASYID ABIZAR KETUA DEWANPIMPINAN HARIAN LAM ROKAN HILIR DI BALAI ADAT MELAYU KABUPATEN ROKAN HILIR



DAFTAR WAWANCARA DINAS PENDIDIKAN DAN



KEBUDAYAAN KABUPATEN ROKAN HILIR

1. Apakah sudah ada pengangkatan terhadap guru-guru yang mengajar muatan lokal budaya melayu Rokan Hilir ?
2. Apakah sudah ada sosialisasi mengenai Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pembelajaran Muatan Lokal Budaya Melayu Rokan Hilir ini ?
3. Apa yang menjadi factor penghambat dari peraturan bupati ini ?
4. Apakah sudah ada Pelatihan terhadap guru-guru muatan lokal ini ?
5. Apa saja upaya yang telah dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam menjaankan Peraturan Bupati Ini ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR WAWANCARA DENGAN KETUA DEWAN PIMPINAN
HARIAN LEMBAGA ADAT MELAYU KABUPATEN
ROKAN HILIR BAPAK H RASYID ABIZAR**

1. Sudah adakah sosialisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir mengenai Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor 79 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pembelajaran muatan lokal budaya melayu Rokan Hilir, ini ?
2. Bagaimana sistem penilaian yang akan dilakukan disaat pelatihan ini terlaksana ?
3. Pentingkah pembelajaran muatan lokal budaya melayu Rokan Hilir ini diajarkan kegenerasi muda ?
4. Apakah sudah ada koordinasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir dengan pihak LAM Kabupaten Rokan Hilir mengenai kerjasama dalam pelatihan guru-guru muatan lokal ?

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR WAWANCARA DENGAN KEPALA SEKOLAH
KECAMATAAN KUBU
KABUPATEN ROKAN HILIR

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui mengenai Peraturan Bupati nomor 79 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pembelajaran Muatan Lokal Budaya melayu Rokan Hilir, ini ?
2. Apakah sudah ada pengangkatan dan pelatihan kepada guru-guru muatan lokal budaya melayu ?
3. Apakah tenaga pengajar materi muatan lokal budaya melayu sudah sesuai dengan jurusannya ?
4. Apakah sangat penting dan perlu jika yang mengajar materi sangat membidangi dibidangnya ?
5. Apakah penting pembelajaran muatan lkal budaya melayu Rokan Hilir di ajarkan di sekolah-sekolah ?

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING

NUR HIDAYAT, SH, MH

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 4 Maret 2020

No : Nota Dinas

Lamp :-

Ha :PengajuanSkripsi

Sdr. Maraden Kasuma Hasibuan

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara **MARADEN KASUMA HASIBUAN**, yang berjudul **"Kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dalam Mengangkat Guru Muatan Lokal Budaya Melayu Rokan Hilir Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pembelajaran Muatan Lokal Budaya Melayu Rokan Hilir"** dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam siding munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr.Wb

Pembimbing

NUR HIDAYAT, SH, MH
NIK.13027038



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**SURAT PERNYATAAN
KEABSAHAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Maraden Kasuma Hasibuan
NIM : 11527103019
Tempat/Tanggal Lahir : Duri, 14 Mei 1996
Program Studi : ILMU HUKUM
Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM
Universitas : UIN SUSKA RIAU

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“KEWENANGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DALAM MENGANGKAT GURU MUATAN LOKAL BUDAYA MELAYU ROKAN HILIR BERDASARKAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 79 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PEMBELAJARAN MUATAN LOKAL BUDAYA MELAYU ROKAN HILIR”** adalah benar karya saya sendiri atau bukan plagiat hasil karya orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri atau plagiat hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 15 Mei 2020

Yang membuat pernyataan

MARADEN KASUMA HASIBUAN

NIM. 11527103019



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Proposal dengan judul KEWENANGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DALAM MENGANGKAT GURU MUATAN LOKAL BUDAYA MELAYU ROKAN HILIR BERDASARKAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 79 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PEMBELAJARAN MUATAN LOKAL BUDAYA MELAYU ROKAN HILIR, ditulis oleh

siswanya :

Nama	: MARADEN KASUMA HASIBUAN
NIM	: 11527103019
Program Studi	: Ilmu Hukum
Diteminarkan pada :	
Hari / Tanggal	: Kamis / 31 Oktober 2019
Narasumber	: H. Muhammad Kastulani, SH, MH

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 7 November 2019

Kepala Badan Tata Usaha
Fakultas Syariah dan Hukum

Narasumber

Erni, S.Sos., MM
NIP. 19680226 199103 2 002

H. Muhammad Kastulani, SH, MH
NIP. 19630909 199002 1 001

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diizinkan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diizinkan mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT KETERANGAN

Pengegelor Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

: **MARADEN KASUMA HASIBUAN**

: **11527103019**

Program studi: **ILMU HUKUM**

: *Kewenangan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Dalam Mengangkat Guru Muatan Lokal Budaya Melayu Rokan Hilir Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pembelajaran Muatan Lokal Budaya Melayu Rokan Hilir*

Pembimbing : **Bapak Nur Hidayat,SH, MH**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 15 Mei 2020

Pimpinan Redaksi



M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL

NIK. 198804302019031010

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Diartang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diartang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT KETERANGAN

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/10105/2019

Dengan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : MARADEN KASUMA HASIBUAN
NIM : 11527103019
Jurusan : ILMU HUKUM

Telah Lulus :

UJIAN KOMPREHENSIF

Yang diselenggarakan pada tanggal : 21 NOVEMBER 2019

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 26 Desember 2019
Dekan,

UIN SUSKA RIAU

DR. Drs. H. Hajar, M.Ag
NIP 195807121986031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 23 Desember 2019

Un-04/F.I/PP.00.9/10066/2019

Bina
1 (satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: MARADEN KASUMA HASIBUAN
NIM	: 11527103019
Jurusan	: Ilmu Hukum S1
Semester	: IX (Sembilan)
Lokasi	: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir Lembaga Adat Melayu (LAM) Kabupaten Rokan Hilir

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
: Kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dalam Mengangkat Guru Muatan Lokal
Budaya Melayu Rokan Hilir Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor
79 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pembelajaran Muatan Lokal Budaya Melayu Rokan
Hilir

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Drs. H. Hajar, M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dianggap mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126



032010

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/24444
TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca
Surat Penugasan Pra Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor :
00.04/11/PP.00.9/5860/2019 Tanggal 18 Juli 2019, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

Nama	:	MARADEN KASUMA HASIBUAN
NIM / KTP	:	11527103019
Program Studi	:	ILMU HUKUM
Jenjang	:	S1
Alamat	:	PEKANBARU
Judul Penelitian	:	KEWENANGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TERHADAP PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPADA GURU MUATAN LOKAL BUDAYA MELAYU ROKAN HILIR BERDASARKAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 79 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PEMBELAJARAN MUATAN LOKAL BUDAYA MELAYU ROKAN HILIR
Lokasi Penelitian	:	1. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ROKAN HILIR 2. LEMBAGA ADAT MELAYU (LAM) KABUPATEN ROKAN HILIR

Dengan ketentuan sebagai berikut:

Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai
tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan
Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 18 Juli 2019



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Rokan Hilir
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Bagansiapiapi
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126



032010

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/29172
TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Penelitian Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/10066/2019 Tanggal 22 Desember 2019, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama
2. NIM / KTP
3. Program Studi
4. Jenjang
5. Alamat
6. Judul Penelitian
7. Lokasi Penelitian

: MARADEN KASUMA HASIBUAN
: 11527103019
: ILMU HUKUM
: S1
: PEKANBARU

: Kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dalam Mengangkat Guru Muatan Lokal Budaya Melayu Rokan Hilir Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pembelajaran Muatan Lokal Budaya Melayu Rokan Hilir

1. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ROKAN HILIR
2. LEMBAGA ADAT MELAYU (LAM) KABUPATEN ROKAN HILIR

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 26 Desember 2019



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU

Tersusun :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Rokan Hilir
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Bagansiapiapi
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang bersangkutan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN KECAMATAN BATU EMPAT TELP. (0767) 22113 FAX. (0767) 22113
BAGANSIAPIPI

Bagansiapiapi, 27 Januari 2020

Kepada :

- Yth. 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Ketua Lembaga Adat Melayu Kabupaten Rokan Hilir

di-

Tempat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

070/Kesbangpol/2020/
Biasa

Rekomendasi Riset

Membaca Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor :503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/29172 tanggal 26 Desember 2019 tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

1. Nama : MARADEN KASUMA HASIBUAN
2. NIM : 11527103019
3. Program Studi : ILMU HUKUM
4. Jenjang : S1
5. Alamat : PEKANBARU
6. Judul : KEWENANGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DALAM MENGANGKAT GURU MUATAN LOKAL BUDAYA MELAYU ROKAN HILIR BERDASARKAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 79 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PEMBELAJARAN MUATAN LOKAL BUDAYA ROKAN HILIR
7. Lokasi : 1. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ROKAN HILIR
2. LEMABAGA ADAT MELAYU (LAM) KABUPATEN ROKAN HILIR

Dengan ketentuan sebagai berikut :

Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dalam proposal yang tidak sesuai/ tidak ada kaitannya dengan Penelitian dimaksud.

Pelaksanaan Penelitian berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung Tanggal dibuatnya surat ini hingga selesai.

Salinan Hasil Riset agar disampaikan pada Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Rokan Hilir.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya dan kepada pihak yang terkait dapat memberikan kemudahan kelancaran kegiatan ini.

PIL KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN ROKAN HILIR



FADLI, SH

Pembina Tk.I

NIP. 19750811 200012 1 004

Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

Tembusan Kepada Yth

1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Arena MTQ Telp. (0767) 23277 - 24198 Fax. (0767) 21276 - Bagansiapiapi

Email : dinas.pendidikan.rohil@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 870 / DISDIKBUD. SEKR/2020/0066

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir dengan ini menerangkan nama tersebut dibawah ini :

: **MARADEN KASUMA HASIBUAN**
: 11527103019
: Ilmu Hukum
: S1
: Pekanbaru

Adalah benar telah melaksanakan penelitian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir dengan judul "Kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dalam Mengangkat Guru Muatan Lokal Budaya Melayu Rokan Hilir Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 79 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pembelajaran Muatan Lokan Budaya Rokan Hilir".

Demikian Surat Keterangan ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bagansiapiapi, Januari 2020

An. KEPALA,
Kabid Pendidikan SMP

WAKIT NUGRAHA, S.Pd
Pembina,
NIP. 19690912 199512 1 001

Tembusan disampaikan kepada,

- Dekan Fakultas Syariah dan hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Rokan Hilir di Bagansiapiapi

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



لمباك عادة ملايو رياو
LEMBAGA ADAT MELAYU RIAU
 كبوفتين روكن حيلير
KABUPATEN ROKAN HILIR

Sekretariat :Jalan Kecamatan Bagansiapiapi

SURAT KETERANGAN

Nomor : 003/SKT/LAMROH/I/2020

yang berada tangan dibawah ini :

: H. RASYID ABIZAR
 : KETUA UMUM DPH LEMBAGA ADAT MELAYU RIAU
 : KABUPATEN ROKAN HILIR
 : JL BINTANG, KOMPLEK GURU BAGANSIAPIAPI

yang menerangkan bahwa :

: **MARADEN KASUMA HASIBUAN**
 : 11527103019
 : ILMU HUKUM
 : SI
 : PEKANBARU
 : KEWENANGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 : DALAM MENGANGKAT GURU MUATAN LOKAL BUDAYA
 : MELAYU ROKAN HILIR BERDASARKAN PERATURAN
 : BUPATI KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 79 TAHUN 2017
 : TENTANG PELAKSANAAN PEMBELAJARAN MUATAN
 : LOKAL BUDAYA ROKAN HILIR

Sehingga dapat disimpulkan bahwa nama tersebut telah melaksanakan Penelitian dikantor Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Rokan Hilir. Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bagansiapiapi, 28 Januari 2020

KETUA UMUM DPH LAM RIAU
 KABUPATEN ROKAN HILIR



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



BIOGRAFI PENULIS

Penulis Bernama “**Maraden Kasuma Hasibuan**” penulis mengawali pendidikan tahun 2001 TK(Taman Kanak-kanak) Tunas Harapan 2 Jl. Putri Tujuh, Kota Dumai Riau. lulus tahun 2002, kemudian pada tahun 2002 penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar di SD YKPP di Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai selama beberapa tahun dan berhenti di Tahun 2003. Pada Tahun 2005 melanjutkan kembali Pendidikan

SD di Sekolah Dasar Negeri 007 Simpang Perwira Kelurahan Bagan Besar, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai, dan di Semester 2 pindah di Sekolah Dasar Negeri 027 Binsus Bukit Batrem I Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai dan lulus pada Tahun 2009. Pada tahun itu juga penulis melanjutkan pendidikan selanjutnya ke jenjang Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 13 Kelurahan Bagan Besar, Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai dan lulus pada Tahun 2012. Di tahun yang sama pula, penulis melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 3 Kota Dumai Kelurahan Bukit Nenas, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai dengan Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial dan lulus pada Tahun 2015.

Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau angkatan 2015 di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Strata Satu (S1) Jurusan Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Tata Negara (HTN), selanjutnya pada bulan Juli hingga bulan Agustus tahun 2018 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai. Hingga akhirnya, pada tanggal 4 Mei 2020 penulis mengikuti ujian Sidang Munaqasah di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dan dinyatakan “LULUS” dengan predikat “Sangat Memuaskan” serta mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH).

1. Diarung mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.